BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kampanye Massa

Kampanye massa merupakan saluran komunikasi massa dalam kampanye pemilihan. Dimana kampanye massa adalah sebuah bentuk persuasi massa dimana seorang komunikator politik memberikan himbauan kepada massa baik melalui hubungan tatap muka ataupun melaui jenis media beperantara yaitu media elektronik, media cetak, atau poster.[15] Berikut akan dijelaskan satu- persatu tentang bentuk- bentuk kampanye massa tersebut diatas :

a) Kampanye tatap muka

Kampanye yang dilakukan oleh tokoh utama masyarakat, apakah dia seorang Demokrat atau Republikan, memikat partisan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun orang banyak itu merupakan persuasi campuran, tujuan kandidat bukan membelokkan oposisi, melainkan memperkuat golongan yang setia, mempublikasikan gaya pribadi, memanfaatkan beberapa menit acara malam jaringan kabel dan acara berita televisi, dan membantu pengumpulan dana.[16] Bentuk kampanye tatap muka seperti berupa orasi kandidat, debat kandidat dan blusukkan atau terjun lapangan langsung yang dilakukan oleh kandidat.

---

[15] Dan Nimmo, *KOMUNIKASI POLITIK Komunikator, Pesan, dan Media,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. 195

[16] *Ibid.*, Hlm. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kampanye Elektronik

Media elektronik termasuk saluran atau media kampanye massa. Yang termasuk media elektronik adalah radio dan televisi, namun telepon (handphone) juga merupakan alat komunikasi politik yang penting. Apalagi, terdapatberebagai inovasi dalam komunikasi elektronik yang juga mempunyai akibat terhadap bidang politik.[17]

(1) Telepon dan politik

Telepon sebagai alat komunikasi lisan satu- kepada satu mempunyai beberapa kegunaan bagi kampanye kontemporer sebagai berikut :[18]

a. Telepon merupakan sarana yang berguna bagi hubungan pribadi jika organisasi kampanye ingin mengumpulkan dana.
b. Telepon mencapai sejumlah besar pemilih dalam tempo yang sangat singkat, baik melalui panggilan telepon kepada para pendukung ataupun digunakan bersama- sama dengan telepon.
c. Telepon menambah jumlah pemilih yang datang. Jika seorang kandidat menginginkan banyak pemilih yang hadir dalam distrik dan seksi yang diketahuinya banyak terdapat simpati yang laten terhadap pencalonannya. Mengarahkan telepon untuk mencapai kantung- kantung Demokrat, Republikan, kelas atas, bawah, atau menengah, atau gabungan lain relatif mudah.

[17]*Ibid.*, Hlm. 196
[18]*Ibid.*, Hlm. 196- 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Telepon juga dapat memperkenalkan kandidat kepada pemilih. Kandidat merekam suatu pesan, kemudian pesan itu diputar pada setiap pesawat penerima telepon setelah terjadi sambungan melalui pemutaran nomor otomat.

e. Telepon digunakan himbauan untuk mendapat suara.

f. Telepon mebantu survai tentang opini para pemilih; *polling* telepon, dengan menggunakan teknik pemutaran nomor secara acak dan menggunakan kuesioner peserta disesuaikan dengan luwes, adalah prosedur utama survai.

(2) Kampanye radio

Dalam bukunya, *The Responsive Chord*, Tony Schwartz, yang telah menciptakan beberapa ribu iklan radio dan televisi untuk kampanye politik, memberikan alasan yang kuat bagi penggunaan radio dalam komunikasi politik. Ia berargumentasi bahwa beberapa generasi orang Amerika telah tumbuh bersama radio, mereka menganggap adanya radio itu begitu wajar seolah- olah merupakan perlengkapan tetap dari lingkungan alaminya. Selain itu radio memiliki keuntungan tertentu yang melebihi sarana komunikasi lain yaitu, media ini lebih murah daripada televisi atau surat langsung. Jika kita memperhatikan satu halaman dari Mc Luhan, dia menekankan bahwa terdapat resonasi antara radio dan telinga serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran manusia, resonasi yang menyajikan peluang besar bagi kampanye radio.[19]

Pedoman praktis bagi kandidat yang mempersiapkan penyajian radio adalah sebagai berikut :[20]

a. Bagi pembicaraan radio, pilihlah tema pokok yang dikenal baik.
b. Bukalah siaran dengan pernyataan atau gagasan yang memikat agar pendengar tetap mendengarkan.
c. Sajikan pidato dengan urutan yang logis dengan kata- kata yang sederhana dan kalimat- kalimat deklaratif yang sederhana.
d. Gunakan sedikit mungkin statistik.
e. Capailah kesimpulan yang pasti.

(3) Politik televisi

Televisi tetap digunakan secara luas sebagai daluran komunikasi kampanye. Terdapat terdapak tekanan dalam kampanye televisi seperti pada *pembuatan citra,* yaitu penggunaan media itu untuk memproyeksikan atribut- atribut terpilih dari kandidat. Pembuatan citra melalui video memerlukan strategi yang jelas. Hal ini mencakup penempatan penampilan yang ditelevisikan selama waktu yang disediakan untuk mencapai khalayak penonton yang maksimum, penggunaan untuk pemrograman hiburan (seperti komersial spot 20 detik, 30 detik, dan 60 detik sebagai pengganti pidato telivisi setengah jam, dan film dokumenter setengah jam yang

[19]*Ibid.*, Hlm. 197
[20]*Ibid.*, Hlm. 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerdik dan menghibur tentang segi kemanusiaan kandidat); dan hanya menekankan masalah yang relevan dengan citra yang diinginkan, bukan membuang- buang waktu dengan membahas masalah yang rumit. Meskipun ada berbagai teknik untuk membangun citra melalui publisitas gratis (mengatur peristiwa kampanye untuk liputan berita, turut dalam debat televisi, dsb) tekanannya adalah pada periklanan televisi yang dibayar.[21]

Riset pada tahun 1960-an, menunjukkan bahwa kampanye massamelalui televisi terutama mempengaruhi suara orang- orang yang mengklasifikasikan diri sebagai independen, diidentifikasi dengan lemah atau sama sekali tidak diidentifikasi dengan salah satu dari kedua partai utama. Dan menurut kebijaksanaan konvensional, berita televisi berbuat lebih banyak dalam mempengaruhi pemilih dari pada iklan yang dibayar. Tetapi, riset yang lebih baru meragukan pendapat yang lebih dini ini. Sekarang terdapat bukti bahwa periklanan politik memberi informasi kepada para pemilih tentang pokok masalah dan bahkan bisa lebih mempengaruhi keputusan mereka ketimbang berita televisi.[22]

Alat elektronik baru dari komunikasi berkembang dan para juru kampanye politik menerapkannya untuk tujuan persuasive. Televisi antenna komunitas, seperti televisi kabel atau CATV sangat menambah jumlah saluran televisi yang tersedia dan peluang bagi

[21]*Ibid.*, Hlm. 199- 200
[22]*Ibid.*, Hlm. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penampilan. Seorang kandidat misalnya, dapat memasok sejumlah besar pemilih dengan penampilan televisi yang direkam, cocok untuk ditonton pada waktu luang melalui *playback* pada pesawat televisi dirumah. Telepon, radio, dan televisi hanya membuka jalan bagi kampanye elektronik yang akan semakin besar lagi dimasa depan.[23]

c) Kampanye Cetak

Kampanye cetak masih merupakan alat utama kandidat politik untuk berkomunikasi dengan khalayak massa. Kepustakaan kampanye (sebaran, brosur, foto, dsb.) masih tetap merupakan bagian bagi politik kontemporer seperti bagi pembicara politik di atas unggul pada zaman pionir. Dua tipe media cetak sangat penting yang disampaikan melalui surat langsung dan koran.[24]

(1) Surat langsung

Pada tahun- tahun terakhir industri surat langsung telah menguasai bagian yang semakin besar dari anggaran kampanye kandidat. Kampanye surat langsung ditujukan kepada;

a. Pengumpulan dana
b. Pembinaan pengenalan nama dan citra kandidat
c. Imbauan untuk mengumpulkan suara

Namun telah ditemukan bahwa surat langsung ternyata tidak memiliki cukup pengaruh terhadap tingkat informasi pemilih, pandangan kandidat, tujuan memberikan suara dalam pemilihan, atau

[23]*Ibid.*, Hlm. 201
[24]*Ibid.*, Hlm. 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan kandidat. Dengan kata lain hasil dari surat langsung tidak selalu memadai bagi biayanya.[25]

(2) Surat kabar

Tiga tipe surat isi surat kabar bertindak sebagai sarana bagi komunikasi kampanye, yaitu; ihwal berita, editorial, iklan. Semuanya membantu pembinan citra dan penyajian masalah. Namun, pembuatan citra adalah yang paling utama. Dan yang terpenting dalam menimbang peran surat kabar dalam persuasi politik ialah dampak dukungan surat kabar kepada bagaimana orang memilih. Karena, riset terakhir mengemukakan bahwa para pemilih lebih menaruh perhatian pada dukungan editorial ketimbang yang pernah diduga.[26]

a. Ihwal berita

Kepada pembaca, surat kabar menyajikan cerita yang membina kesan tentang pentingnya, kredibilitas, watak, gaya, dan reputasi kandidat melalui sarana seperti penempatan cerita, judul, isi, dan banyaknya liputan yang ditujukan kepada setiap pencari jabatan.

b. Editorial

Dukungan editorial lebih berorientasikan masalah, tetapi juga dengan cara mengesankan atau dengan cara menghinakan, berbicara tentang sifat pribadi kandidat.

---

[25]*Ibid.*, Hlm. 201- 202
[26]*Ibid.*, Hlm. 202- 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Iklan

Kurang dari setengah dari pernyataan dalam iklan politik dalam surat kabar mengacu kepada masalah, bukan kepada kandidat atau kepada afiliasi partainya. Periklanan politik melaksanakan fungsi lain di luar pembuatan citra dan penyajian masalah. Iklan politik dalam surat kabar, begitu pula yang dibagikan dengan selebaran, brosur, dan surat langsung, menyongkong morel para pekerja kampanye setidak- tidaknya mereka mendapat kesan bahwa terjadi pengeluaran uang.

d) Kampanye Poster

Poster politik adalah salah satu teknik komunikasi kampanye yang paling beraneka warna dan paling menarik. Yang tersebar pada lanskap dalam setiap pemilihan, pada *billboard*, pohon, tiang telepon, atap gudang, dan dinding bangunan adalah contoh- contoh bentuk periklanan politik ini. Poster mencari dukungan luas untuk kandidat, partai, dan program partai; mengumumkan pertemuan politik dan rapat umum partai yang akan datang; membantu mengumpulkan dana; mengkritik oposisi; membina pengenalan nama bagi kandidat yang tak dikenal; dan membangkitkan semangat para pekerja kampanye. Poster yang disebarluaskan dengan seni rupa yang menangkap gagasan dan tema kampanye adalah pengingat sehari- hari akan imbauan yang diterima oleh pemilih melalui hubungan telepon, pengumuman radio, spot telivisi, atau iklan surat kabar. Dengan demikian poster membantu menjalin berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaran benang kampanye persuasif, dan poster melaksanakan fungsi yang berguna dengan biaya yang relatif murah.[27]

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang membahas mengenai "Pengaruh Kampanye Massa Terhadap partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kelurahan Pekauman Kabupaten Gresik Dalam Pemilu Presiden 2014" dapat dimaknai dengan kampanye massa akan mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Presiden 2014. Dimana masing- masing calon kandidat Capres dan Cawapres menggunakan berbagai bentuk kampanye massa untuk mempengaruhi pemilih dalam partisipasi politik maupun dalam menentukan pilihan Capres dan Cawapresnya Dalam Pemilu Presiden 2014.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara biasa dalam mentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Dalam sosiologi politik terdapat dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain yaitu sosialisasi politik dan partisipasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi- persepsinya mengenai politik serta reaksi- reaksinya terhadap

[27]*Ibid.*, Hlm. 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala- gejala politik. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Alex Thio, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu- individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan- kepercayaan, dan sikap politik. Sedangkan partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada berbagai tingkatan dalam suatu sistem politik.[28] Michal Rush dan Philip Althof berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, karena partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosiali politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan.[29]

a) Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy).*[30]

Banyak pendapat tentang definisi patisipasi politik dari beberapa sarjana yang memelopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama, adalah sebagai berikut :

(1) Herbert Mc Closky (seorang tokoh maslah partisipasi)

"The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy".

[28] Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), Hal. 135
[29] *Ibid.*, Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Hal. 147
[30] Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Jaya, 2008), Hlm. 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.[31]

(2) Norman H. Nie dan Sidney Verba

"By political participation we refervto those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take.

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat- pejabat negara dan /atau tindakan- tindakan yang diambil oleh mereka.[32] Yang paling diteropong terutama adalah "tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan- keputusan pemerintah", sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha- usaha untuk mempengaruhi "alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat" *(the authoritative allocation of values for a society.)*

(3) Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson

"By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained

[31]*Ibid.*, Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Hlm. 367
[32] Miriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai Politik, (Jakarta : PT Gramedia, 1982), Hlm.1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective".

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi- pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.[33]

Dari beberapa pendapat diatas tersebut dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang baik secara langsung atau tidak langsung dalam memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

b) Batasan- Batasan Partisipasi Politik

Kegiatan tertentu bisa dikategorikan partisipasi politik apa tidak, hal tersebut berkaitan dengan konseptualisasi dari partisipasi politik. Dimana dalam konseptualisasi merupakan upaya menyusun "batasan- batasan" sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk atau tidak termasuk ke dalam partisipasi politik. Berikut adalah batasan-batasan partisipasi politik:[34]

(1) Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

[33]*Ibid.*, Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik,* Hlm. 368
[34] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), Hlm.180- 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau pun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

(3) Baik kegiatan yang berhasil (efektif) meupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

(4) Kegiatan memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung,yaitu :

a. Kegiatan yang langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat.

b. Kegiatan tidak langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui cara- cara di luar prosedur yang wajar (nonkonvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa), melakukan pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru- hara, mogok, pembangkan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan- gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

c) Hierarki Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara *(voting)* entah untuk memilih para calon wakil rakyat, entah untuk memilih kepala negara.[35] Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk- bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

(1) Menduduki jabatan politik atau administratif
(2) Mencari jabatan politik atau administratif
(3) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
(4) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
(5) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi- politik
(6) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi- politik
(7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
(8) Partisipasi dalam diskusi politik informal
(9) Partisipasi dalam pemungutan suata *(voting)*

Diatas tersebut merupakan hierarki partisipasi politik. Hierarki partisipasi tersebut berlaku di berbagai sistem politik. Tetapi arti masing- masing tingkat partisipasi tersebut bisa berbeda dari sistem politik yang satu ke

[35] *Ibid.*, Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Hal. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem politik yang lain. Dan partisipasi pada satu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Puncak hierarki terdapat orang- orng yang menduduki berbagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun para anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan politik formal. Dibawah para pemegang jabatan- jabatan politik formal adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi politik. Termasuk disini adalah semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Kesamaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tercakup dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan posisi, orang atau kelompok- kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.[36]

d) Bentuk Dan Tipologi Partisipasi Politik

Bentuk atau kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik adalah sebagai berikut :[37]

(1) Kegiatan memberikan suara dalam Pemilihan Umum.

(2) Menghadiri rapat umum.

---

[36] Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 123- 124

[37] *Ibid.*, Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik,* Hlm. 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

(4) Menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik*, partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu :[38]

(1) Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif dalah kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, seperti :

a. Mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum
b. Mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah
c. Mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan
d. Membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah

(2) Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output, seperti kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

(3) Partisipasi Apatis

Partisipasi Apatis adalah mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka

[38] *Ibid.*, Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu* Politik, Hlm. 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cita- citakan, seperti tidak ikut mencobblos atu menggunakan hak suaranya, atau sering disebut golongan putih (golput).

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :[39]

(1) Apatis

Adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

(2) Spektator

Adalah orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

(3) Gladiator

Adalah mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

(4) Pengeritik

Adalah orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvesional.

Berbeda dengan Milbarth dan Gel, Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial, dia membagi partisipasi menjadi 6 lapisan yaitu :

(1) Pemimpin politik

(2) Aktivis politik

[39] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu* Politik, (Jakarta: Anggota Ikapi , 2010), Hlm. 182- 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide- ide, sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain)

(4) Warga negara

(5) Marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan system politik)

(6) Orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Dari berbagai tipologi partisipasi politik diats tersebut dimaksudkan untuk memudahkan analisis terhadap bentuk- bentuk partisipasi politik, karena dalam kenyataan tidak ada seorang yang dapat secara persis diketegorikan kedalam salah satu tipe partisipasi tersebut.

e) Faktor- Faktor Partisipasi Politik

Pada partisipasi politik erat sekali hubungannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan yang lainnya, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang- kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.[40]

[40]*Ibid.*, Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Hlm. 368- 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik tentunya karena beberapa faktor. Faktor- faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik sesorang adalah sebagai berikut :[41]

(1) Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

(2) Kepercayaan Kepada Pemerintah (Sistem Politik)

Sikap kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah, meliputi apakah ia menilai pemerintah dapat dipercata dan dipengaruhi atau tidak.

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe, yaitu:

a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
b. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, apabila partisipasi politik cenderung pasif- tertekan (apatis).
c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi ini disebut militant radikal.

[41] *Ibid.*, Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu* Politik,Hlm. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Kedua faktor diatas bukan faktor- faktor yang berdiri sendiri, artinya tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor- faktor lain seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Morris Rosenberg ada 3 alasan pokok mengapa seseorang enggan sekali berpartisipasi politik :[42]

1. Individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai- partai politik tertentu.
2. Konsekuensi yang ditanggung dari suatu sktivitas politik mereka sebagai pekerjaan sia- sia. Mungkin disini individu merasa adanya jurang pemisah antara cita- citanya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah begitu besarnya sehingga dianggap tiada lagi aktivitas politik yang kiranya dapat menjembatani.
3. Beranggapan bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik. Maka dengan tidaknya seseorang

[42] Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Hlm 144- 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangsang politik yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong kearah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apati. Disisni individu merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali daripada sifat politiknya. Dan dalam hubungan ini, individu merasa bahwa kegiatan- kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relatif kecil. Dengan demikian partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dapat dianggap sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang membahas mengenai "Pengaruh Kampanye Massa Terhadap partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kelurahan Pekauman Kabupaten Gresik Dalam Pemilu Presiden 2014" dapat dimaknai dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Presiden 2014 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dimana pemilih pemula yang satu dengan pemilih pemula yang lain tidak sama dalam hal faktor yang mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Presiden 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KERANGKA BERFIKIR

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Adapun jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Ho (H nol), yaitu hipotesa yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) H1 (H satu) atau disebut Hipotesa alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Ho: Tidak Ada Pengaruh Positif Yang Signifikan Kampanye Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Pekauman Kabupaten Gresik Dalam Pemilu Presiden 2014.
2) H1: Ada Pengaruh Positif Yang Signifikan Kampanye Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Pekauman Kabupaten Gresik Dalam Pemilu Presiden 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id